

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR BAGAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Kerangka Pemikiran	15
G. Metode Penelitian	29
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA TERORGANISIR ..	35
A. Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>)	35
1. Konsep Sistem Peradilan Pidana	35
2. Komponen Sistem Peradilan Pidana	37
B. Perlindungan Hukum	39
1. Pengertian Perlindungan Hukum	39
2. Bentuk Perlindungan Hukum	40
C. Tindak Pidana	41
1. Pengertian Tindak Pidana	41
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	43
3. Tindak Pidana Terorganisir (<i>Organized Crime</i>)	44

a.	Pengertian Tindak Pidana Terorganisir (<i>Organized Crime</i>)	44
b.	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terorganisir (<i>Organized Crime</i>) ..	51
BAB III PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP		
WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM		
TINDAK PIDANA TERORGANISIR DI INDONESIA		
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM		
		54
A.	Sejarah dan Definisi <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i>	54
1.	Sejarah <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i>	54
2.	Definisi <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....	58
3.	Definisi <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> dalam Hukum Islam	61
B.	Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i>	69
1.	Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	69
2.	Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> dalam Hukum Islam	75
3.	Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> dalam Tindak Pidana Terorganisir di Indonesia	80
C.	Peraturan yang Berkaitan dengan <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> dalam Tindak Pidana Terorganisir	83
1.	Peraturan yang Berkaitan dengan <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> Tindak Pidana Terorganisir dalam Perundang- Undangan Indonesia	83
2.	Peraturan yang Berkaitan dengan <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> Tindak Pidana Terorganisir dalam Hukum Islam	98
D.	Kendala Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> dalam Tindak Pidana Terorganisir	109
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP		
WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM		

TINDAK PIDANA TERORGANISIR DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	114
A. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> dalam Tindak Pidana Terorganisir di Indonesia	114
B. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> dalam Tindak Pidana Terorganisir Perspektif Hukum Islam	117
C. Relevansi Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorganisir di Indonesia dengan Hukum Islam Pada Masa Mendatang (<i>Ius Constituendum</i>)	119
BAB V PENUTUP	126
A. Simpulan	126
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

